



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



<https://www.bpsdm.kalteng.go.id/>

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KATA PENGANTAR

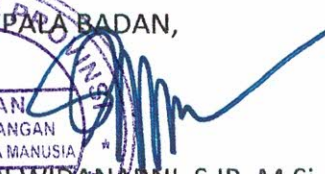
Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan segala anugerah dan rahmat-Nya dengan segala kemampuan yang dimiliki dapat menyelesaikan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

Dokumen ini disusun dengan maksud memberikan arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Anggaran Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Didalam penyusunan dokumen Rancangan Awal RENJA ini ada banyak hal yang didapat. Hal ini tentunya dimaksudkan dapat memberikan manfaat dan acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, semoga dokumen Rancangan Awal RENJA Tahun 2023 ini dapat diterima dan menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 08 Februari 2022

KEPALA BADAN,

BADAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
SRI WIDANARNI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690212 198911 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 3

 1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 7

 2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan
 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 7

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
 Daerah 16

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 17

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 22

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 22

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 23

 3.3 Program dan Kegiatan 24

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 29

BAB V PENUTUP 32

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tupoksi yang selaras dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 yaitu “Kalimantan Tengah makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)”, yaitu pada misi ke-4 (empat) yaitu Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.

Pelembagaan Sistem Penguatan Kapasitas SDM Masyarakat dan Pemerintah melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia sumber daya aparatur di Provinsi Kalimantan Tengah untuk lima tahun ke depan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Dengan demikian SKPD Provinsi dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan berpedoman pada RPJMD yang telah memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, selanjutnya SKPD menyusun Rencana Kerja (RENJA) untuk satu tahun dengan pedoman Renstra yang sudah di susun, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2023 sebagaimana sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

- n. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 disusun dengan maksud dan tujuan :

- Memaparkan kesinambungan program/kegiatan selama 5 tahun masa jabatan Kepala Daerah dengan penyelenggaraan program/kegiatan pada masing – masing tahunnya dan menilai kembali efektivitas dan efisiensi program/kegiatan tersebut.
- Memberikan gambaran dalam bentuk dokumen tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rancangan Awal Renja K/L dan Rancangan Awal Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Tahun 2022

Bab ini memuat kajian (preview) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (tahun $n - 2$) dan perkiraan capaian tahun 2022 (tahun $n - 1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh manan tingkat kinerja pelayanan Perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan Perangkat Daerah :
Khusus Provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program, jumlah kegiatan, dan jumlah sub kegiatan; Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan, dan sub

kegiatan; Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Rancangan Awal Renja PD Tahun 2023, memuat rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan serta penjelasan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan RKA.

BAB.V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2021 pada pelaksanaannya telah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga sesuai dengan Review Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021. Capaian tersebut berdampak positif terhadap perkiraan capaian program dan kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja tahun 2022.

Dalam tahun anggaran 2021, anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 27.531.641.707,00 dari keseluruhan anggaran tahun 2021 tersebut telah terserap sebesar Rp. 23.989.071.835,00 atau terserap sebesar 87,20%, dengan rincian belanja operasional sebesar Rp. 27.531.641.707,00,- terealisasi sebesar Rp. 23.989.071.835,00 atau terserap sebesar 87,13%, dan belanja modal sebesar Rp. 194.878.000,00 terealisasi sebesar Rp. 188.628.000,00 atau terserap sebesar 96,79%. Secara garis besar realisasi anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Operasional	27.531.641.707,00	23.989.071.835,00	87,13
2.	Belanja Modal	194.878.000,00	188.628.000,00	96,79
JUMLAH		27.531.641.707,00	23.989.071.835,00	87,20

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW IV 2021) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW IV 2021) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW IV 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			12.722.653.997		15.226.382.206		12.722.653.997		11.110.972.708				26.337.354.914				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			152.902.820		137.948.900		152.902.820		146.821.350				284.770.250				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENJA SKPD yang tersusun	2 Dokumen	20.615.820	2 Dokumen	16.533.000	1 Dokumen	20.615.820	1 Dokumen	20.049.100	100,00%	97,25%	3 Dokumen	36.582.100	150%	177,45%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	2 Dokumen	21.105.000	2 Dokumen	37.808.000	1 Dokumen	21.105.000	1 Dokumen	20.932.000	100,00%	99,46%	3 Dokumen	58.800.000	150%	278,61%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun	2 Dokumen	16.895.000	2 Dokumen	-	1 Dokumen	16.895.000	1 Dokumen	16.653.300	100,00%	98,57%	3 Dokumen	16.653.300	150%	98,57%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan TEPPA SKPD yang tersusun	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	43.600.000	3 Laporan	45.000.000	3 Laporan	44.636.400	100,00%	99,33%	15 Laporan	88.296.400	125%	196,21%		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendukung LPPD dan LKJP yang tersusun Jumlah dokumen LKIP yang tersusun Jumlah laporan Monev Program dan Kegiatan yang tersusun	2 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan	49.287.000	2 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan	40.007.900	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	49.287.000	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	44.430.550	100,00% 100,00% 100,00%	 90,15% 	4 Dokumen 2 Dokumen 5 Laporan	84.438.450	200% 200% 125%	 171,32% 		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.240.638.152		9.937.054.377		8.240.638.152		6.743.928.256				16.680.982.633				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang terpenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	55 Orang	8.218.140.202	55 Orang	9.914.555.367	55 Orang	8.218.140.202	55 Orang	6.721.441.006	100,00%	81,73%	110 Orang	16.635.396.933	200%	202,43%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 Laporan	10.859.950	1 Laporan	10.859.850	1 Laporan	10.859.350	1 Laporan	10.849.250	100,00%	0,00%	2 Laporan	21.709.100	200%	199,90%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD yang tersusun	2 Laporan	11.638.000	2 Laporan	11.638.600	1 Laporan	11.638.000	1 Laporan	11.638.000	100,00%	100,00%	3 Laporan	23.276.600	150%	200,01%		
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			159.143.640		77.925.650		159.143.640		157.589.564				235.515.214				
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah gedung kantor yang mendapat perlindungan dari asuransi	2 Gedung	15.000.000	2 Gedung	14.420.250	2 Gedung	15.000.000	2 Gedung	14.411.264	100,00%	96,08%	4 Gedung	28.831.514	200%	192,21%		
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang dan aset SKPD yang terinventarisir Peningkatan Nilai akreditasi Lembaga Kediklatan	1 Laporan 95 Point	144.143.640	1 Laporan 95 Point	63.505.400	1 Laporan 95 Point	144.143.640	1 Laporan 95 Point	143.178.300	100,00% 100,00%	99,33% 	2 Laporan 190 Point	206.683.700	200% 200%	143,39% 		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			395.026.640		638.369.400		395.026.640		264.174.150				902.543.550				
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas yang dibuat untuk ASN SKPD	93 Stel	-	93 Stel	-	0 Stel	-	0 Stel	-	0,00%	0,00%	93 Stel	-	100%	0,00%		
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan penilaian angka kredit	2 Kali	80.442.640	2 Kali	91.796.600	2 Kali	80.442.640	2 Kali	78.120.950,00	100,00%	97,11%	4 Kali	169.917.550	200%	211,23%		
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah pedoman yang disusun sebagai standar penilaian sertifikasi profesi Lama pemantauan mutu penyelenggaraan kegiatan diklat	80 Orang 3 Pedoman 12 Bulan	184.584.000	80 Orang 3 Pedoman 12 Bulan	151.025.800	80 Orang 3 Pedoman 6 Bulan	184.584.000	80 Orang 3 Pedoman 6 Bulan	167.549.700	100,00% 100,00% 100,00%	 90,77% 	160 Orang 6 Pedoman 18 Bulan	318.575.500	200% 200% 150%	 172,53% 		
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek/ workshop	450 Orang	130.000.000	450 Orang	395.547.000	450 Orang	130.000.000	40 Orang	18.503.500	8,89%	14,23%	490 Orang	414.050.500	103%	318,50%		

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			746.055.372		1.104.522.075		746.055.372		716.605.150				1.821.127.225				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan instalasi listrik/penerangan	3 Gedung	60.000.000	3 Gedung	59.369.000	1 Gedung	60.000.000	1 Gedung	59.336.300	100,00%	98,89%	4 Gedung	118.705.300	133%	197,84%		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit pengadaan barang/jasa untuk pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	42 Unit	277.500.000	42 Unit	481.260.225	42 Unit	277.500.000	42 Unit	270.927.900	100,00%	97,63%	84 Unit	752.188.125	200%	271,06%		
	Lama pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan		12 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		100,00%		18 Bulan		150%			
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lama penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	53.108.750	6 Bulan	35.000.000	6 Bulan	34.818.500	100,00%	99,77%	18 Bulan	88.027.250	150%	251,51%		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan/koran untuk pejabat SKPD	7665 Eksemplar	35.000.000	7665 Eksemplar	21.720.000	1850 Eksemplar	35.000.000	1850 Eksemplar	21.510.000	100,00%	61,46%	9515 Eksemplar	43.230.000	124%	123,51%		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat/sosialisasi selama setahun	35 Kali	288.859.372	35 Kali	419.389.700	18 Kali	288.859.372	18 Kali	288.539.050	100,00%	99,89%	53 Kali	707.328.750	151%	245,08%		
	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas selama setahun	80 Kali		80 Kali		10 Kali		10 Kali				90 Kali		113%			
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Lama penyediaan informasi kegiatan yang update melalui website	12 Bulan	49.696.000	12 Bulan	69.674.400,00	12 Bulan	49.696.000	12 Bulan	41.373.400,00	100,00%	83,25%	12 Bulan	111.047.800	100%	223,45%		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			2.453.061.570		2.556.051.551		2.453.061.570		2.515.403.738				5.071.455.289				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadministrasian surat masuk keluar dan surat lainnya	2500 surat	22.759.210	2500 surat	20.227.050	650 surat	22.759.210	600 surat	21.966.400,00	92,31%	96,52%	3100 surat	42.193.450	124%	185,39%		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lama penggunaan jasa listrik, PDAM, telpon dan internet	12 Bulan	817.218.800	12 Bulan	846.795.800	6 Bulan	817.218.800	6 Bulan	759.589.188,00	100,00%	92,95%	18 Bulan	1.606.384.988	150%	196,57%		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang terpenuhi kebutuhan gajinya	38 Orang		38 Orang		38 Orang		38 Orang		100,00%		76 Orang		200%			
	Lama Pengelolaan administrasi keuangan dan aset SKPD	12 Bulan	1.613.083.560	12 Bulan	1.689.028.701	6 Bulan	1.613.083.560	6 Bulan	1.733.848.150	100,00%	107,49%	18 Bulan	3.422.876.851	150%	212,19%		
	Lama pengelolaan Corporate University (CORPU)	12 Bulan		12 Bulan		6 Bulan		6 Bulan		100,00%		18 Bulan		150%			
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			575.825.803		774.510.253		575.825.803		566.450.500				1.340.960.753				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak STNK setiap tahun	26 Unit	8.000.000	26 Unit	6.910.900	0 Unit	8.000.000	0 Unit	7.969.000	0,00%	0,00%	26 Unit	14.879.900	100%	186,00%		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat atau diperbaiki selama setahun	10 Unit	172.000.000	10 Unit	171.447.600	10 Unit	172.000.000	10 Unit	171.000.000,00	100,00%	99,42%	20 Unit	342.447.600	200%	199,10%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dan layak pakai	60 Unit	37.500.000	60 Unit	37.375.000	15 Unit	37.500.000	30 Unit	35.651.500,00	200,00%	95,07%	90 Unit	73.026.500	150%	194,74%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara/direhab	4 Gedung	248.325.803	4 Gedung	408.826.753	0 Gedung	248.325.803	0 Gedung	246.500.000	0,00%	99,26%	4 Gedung	655.326.753	100%	263,90%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dirawat/diperbaiki	90 Unit	60.000.000	90 Unit	100.000.000	0 Unit	60.000.000	0 Unit	55.445.000	0,00%	92,41%	90 Unit	155.445.000	100%	259,08%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat/diperbaiki	100 Unit	50.000.000	100 Unit	49.950.000	50 Unit	50.000.000	60 Unit	49.885.000,00	120,00%	99,77%	160 Unit	99.835.000	160%	199,67%		

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15003865.710		15.003.865.710		497.450.900		15.003.865.710		13.066.727.127				14.518.540.577				
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis			663.300.000		497.450.900		663.300.000		529.021.600				1.077.561.050				
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun	4 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	98.458.300	2 Dokumen	75.000.000	0 Dokumen	72.040.000	0,00%	96,05%	4 Dokumen	170.498.300	100%	227,33%		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta yang mengikuti workshop Inovasi, Workshop PMPRB, dan Workshop Revolusi Mental	135 Orang		135 Orang		0 Orang		150 Orang		0,00%		285 Orang		211%			
	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Manajemen PNS, Diklat Revolusi Mental, Diklat Manajemen Bencana, dan Diklat Bela Negara	120 Orang		120 Orang		120 Orang		96 Orang		80,00%		216 Orang		180%			
	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat P4GN, dan Diklat Perpustakaan	60 Orang	499.000.000	60 Orang	398.992.600	60 Orang	499.000.000	62 Orang	368.206.900	86,67%	73,79%	112 Orang	767.199.500	187%	153,75%		
	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat PBJ, Diklat Menyusun HPS, Diklat Tata Naskah Dinas, Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah, Diklat menyusun kebutuhan dan anggaran PBJ	150 Orang		150 Orang		150 Orang		203 Orang		135,33%		353 Orang		235%			
	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Perancang Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang		30 Orang		0 Orang		0,00%		30 Orang		100%			
	Bimtek dan workshop lainnya	100 Orang		30 Orang		0 Orang		400 Orang		0,00%		430 Orang		430%			
	Diklat Teknis Inti lainnya	240 Orang		30 Orang		0 Orang		200 Orang		0,00%		230 Orang		96%			
Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah buku yang ditata dan diarsipkan	500 Buku	89.300.000	500 Buku	51.088.550	125 Buku	89.300.000	0 Buku	88.774.700,00	0,00%	99,41%	500 Buku	139.863.250	100%	156,62%		
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			14.340.565.710				14.340.565.710		12.537.705.527				13.440.979.527				
Sub Kegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah sertifikat peserta diklat yang telah teregistrasi	2000 Buah	76.496.000	2000 Buah	97.067.000	0 Buah	76.496.000	2500 Buah	76.002.700,00	0,00%	99,36%	4500 Buah	173.069.700	225%	226,25%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi	40 Orang	120.000.000	40 Orang	120.000.000	0 Orang	120.000.000	0 orang	118.419.750	0,00%	98,68%	40 orang	238.419.750	100%	198,68%		
Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah dokumen dan sertifikasi penerapan standarisasi ISO penyelenggaraan diklat	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	0 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	147.604.700	0,00%	98,40%	2 Dokumen	297.604.700	200%	198,40%		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS Provinsi, Kabupaten/Kota yang mengikuti Latsar	1393 Orang	13.598.469.300	1393 Orang	25.959.800	279 Orang	13.598.469.300	279 Orang	11.819.371.327	100,00%	86,92%	1672 Orang	11.845.331.127	120%	87,11%		
	Jumlah PNS Provinsi, Kabupaten/Kota yang mengikuti PKA dan PKP	378 Orang		378 Orang		80 Orang		80 Orang		100,00%		458 Orang		121%			
Sub Kegiatan Pembinaan, Penguatan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan untuk peningkatan keterampilan dan profesionalisme	75 Orang		75 Orang		19 Orang		0 Orang		0,00%		75 Orang		100%			
	Jumlah diklat yang dipantau dan dievaluasi penyelenggaraannya	57 Kegiatan		57 Kegiatan		9 Kegiatan		6 Kegiatan		66,67%		63 Kegiatan		111%			
	Jumlah laporan pengumpulan pengolahan data kediklatan	4 Laporan	395.600.410	4 Laporan	510.247.200	1 Laporan	395.600.410	4 Laporan	376.307.050	400,00%	95,12%	8 Laporan	886.554.250	200%	224,10%		
	Jumlah alumni diklat manajerial yang dilakukan monev	75 Orang		75 Orang		0 Orang		75 Orang		0,00%		150 Orang		200%			
	Lama pelaksanaan pemenuhan informasi dan dokumentasi SKPD bagi publik	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100,00%		24 Bulan		200%			

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA OPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SKPD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 Periode Pelaksanaan : 2021

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2017-2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2020 (%)		
4	5	6		7		8		9		10 = 7+13		11 = 10/6 x 100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENJA SKPD yang tersusun	5	Dokumen	395.419.050	3	Dokumen	25.190.000	2	Dokumen	20.615.820	5	Dokumen	26.136.600	160,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	5	Dokumen	417.148.350	3	Dokumen	54.710.330	4	Dokumen	21.105.000	7	Dokumen	60.841.000	200,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun	0	Laporan	0	0	Laporan	0	4	Laporan	16.895.000	8	Laporan	27.835.200	0,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan TEPRAS SKPD yang tersusun	5	Laporan	340.766.350	3	Laporan	53.132.500	12	Laporan	45.000.000	36	Laporan	96.323.300	780,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendukung LPPD dan LKPJ yang tersusun	5	Laporan		3	Laporan		2	Laporan		5	Laporan		160,00%
	Jumlah dokumen LKIP yang tersusun	5	Dokumen	588.820.900	3	Dokumen	47.562.000	1	Dokumen	49.287.000	3	Dokumen	90.982.850	120,00%
	Jumlah laporan Monev Program dan Kegiatan yang tersusun	5	laporan		3	laporan		1	laporan		3	laporan		120,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang terpenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan	275	Orang	44.388.509.373	55	Orang	9.699.108.727	55	Orang	7.992.660.202	220	Orang	15.507.426.346	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	5	Laporan	153.200.000	3	Laporan	12.584.850	1	Laporan	10.859.950	1	Laporan	10.849.250	80,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD yang tersusun	5	Laporan	137.199.800	3	Laporan	13.052.200	2	Laporan	11.638.600	2	Laporan	11.638.000	100,00%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah gedung kantor yang mendapat perlindungan dan asuransi	5	Tahun	75.000.000	1	Tahun	14.420.250	0	Tahun	15.000.000	0	Tahun	-	20,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang dan aset SKPD yang terinventarisir	5	Dokumen	354.970.100	3	Dokumen	207.768.200	1	Dokumen	32.763.400	3	Dokumen	177.657.500	120,00%
	Peningkatan Nilai akreditasi Lembaga Kediklatan	60	Bulan	149.229.000	36	Bulan		12	Bulan		36	Bulan	72	385.425.700 120,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stelan pakaian dinas yang dibuat untuk ASN SKPD	705	stell	434.082.000	0	stell	0	0	stell	0	0	stell	-	0,00%
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan penilaian angka kredit	60	Bulan	924.112.200	36	Bulan	102.410.750	12	Bulan	93.142.640	30	Bulan	41.625.950	110,00%
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		Peserta		0	Peserta			Peserta	217.000.000,00	0	Peserta	34.196.200	#DIV/0!
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bintek/ workshop		Peserta		0	Peserta		450	Peserta	130.000.000,00	460	Peserta	14.568.000	#DIV/0!
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah														

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan instalasi listrik/penerangan	60	Bulan	190.663.750	36	Bulan	151.492.500	12	Bulan	60.000.000	36	Bulan	-	72	151.492.500	120,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit pengadaan barang/jasa untuk pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	60	Bulan	2.869.525.000	36	Bulan	1.054.382.920	12	Bulan	78.000.000	39	Bulan	267.997.400	75	1.322.380.320	125,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lama penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan	406.240.500	36	Bulan	105.461.250	12	Bulan	35.000.000	39	Bulan	10.035.000	75	115.496.250	125,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan/koran untuk pejabat SKPD	60	Eksemplar	210.000.000	36	Eksemplar	68.261.000	21	Eksemplar	35.000.000	63	Eksemplar	13.550.000	99	81.811.000	165,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat/sosialisasi selama setahun Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas selama setahun	74 400	Kali orang	2.565.956.399	4 80	Kali orang	339.995.700	35 80	Kali orang	288.859.372	110 245	Kali orang	295.846.850	114 325	635.842.550	154,05% 81,25%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Lama penyediaan informasi kegiatan yang update melalui website	48	Bulan	412.000.000	36	Bulan	55.974.400	12	Bulan	76.000.000	36	Bulan	35.027.000	72	91.001.400	150,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadministrasian surat masuk keluar dan surat lainnya	15000	Surat	156.255.900	10000	Surat	17.174.000	2500	Surat	22.759.210	7.500	Surat	18.734.300	17500	35.908.300	116,67%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lama penggunaan jasa listrik, PDAM, telpon dan internet	60	Bulan	5.825.079.834	36	Bulan	1.078.749.400	12	Bulan	1.012.218.800,00	39	Bulan	683.860.828	75	1.762.610.228	125,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang terpenuhi kebutuhan gajinya Lama Pengelolaan administrasi keuangan dan aset SKPD Lama pengelolaan Corporate University (CORPU)	36 5 0	Bulan Tahun Tahun	5.832.452.556 495.519.000 0	38 1 0	Bulan Tahun Tahun	1.367.187.600 495.519.000 0	12	Bulan	1.838.563.560,00	39 0 0	Bulan	1.843.897.500	77 1 0	3.211.085.100	213,89% 20,00% #DIV/0!
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak STNK setiap tahun		Unit		5	Unit	8.000.000,00	5	Unit	8.000.000,00	15	Unit	-	20	8.000.000	#DIV/0!
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat atau diperbaiki selama setahun		Unit		26	Unit	172.000.000,00	26	Unit	172.000.000,00	84	Unit	131.994.400	110	303.994.400	#DIV/0!
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dan layak pakai		Unit		91	Unit	37.500.000,00	60	Unit	37.500.000,00	180	Unit	41.401.500	271	78.901.500	#DIV/0!
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara/direhab		Gedung		4	Gedung	250.000.000	4	Gedung	248.325.803,00	12	Gedung	-	16	250.000.000	#DIV/0!
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dirawat/diperbaiki		Unit		91	Unit	50.000.000	100	Unit	60.000.000,00	300	Unit	52.240.000	391	102.240.000	#DIV/0!
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat/diperbaiki		Unit		100	Unit	50.000.000	100	Unit	50.000.000,00	300	Unit	43.695.000	400	93.695.000	#DIV/0!
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis																
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun		Dokumen		3	Dokumen	150.000.000	4	Dokumen	75.000.000,00	12	Dokumen	18.265.000	15	168.265.000	#DIV/0!

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta yang mengikuti workshop Inovasi, Workshop PMPRB, dan Workshop Revolusi Mental		220		123.144.000		4.200		4420		#DIV/0!		
	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Manajemen PNS, Diklat Revolusi Mental, Diklat Manajemen Bencana, dan Diklat Bela Negara		120		360.000.000		0		120		#DIV/0!		
	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat P4GN, dan Diklat Perpustakaan		40		120.000.000		0		40		#DIV/0!		
	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat PBJ, Diklat Menyusun HPS, Diklat Tata Naskah Dinas, Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah, Diklat menyusun kebutuhan dan anggaran PBJ	Peserta	120	Peserta	495.000.000	1400 Peserta	459.000.000,00	Peserta	583.801.000	706.945.000		#DIV/0!	
	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Perancang Peraturan Perundang-Undangan		0		0		0		0		#DIV/0!		
	Bimtek dan Workshop lainnya		120		18.796.000		0		120		#DIV/0!		
	Diklat Teknis Inti lainnya		80		0		0		80		#DIV/0!		
Sub Kegiatan Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah buku yang ditata dan diarsipkan					500 Buku	89.300.000	1.500 Buku	98.774.700	1500	98.774.700	#DIV/0!	
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional													
Sub Kegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah sertifikat peserta diklat yang telah teregistrasi	Buah	703	Buah	90.037.360	2000 Buah	98.000.000,00	4.000 Buah	26.944.000	4703	116.981.360	#DIV/0!	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi		30	Peserta	21.513.600	40 Peserta	135.000.000,00	80 Peserta	65.190.450	110	86.704.050	#DIV/0!	
Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah dokumen dan sertifikasi penerapan standarisasi ISO penyelenggaraan diklat	Dokumen	1	Dokumen	6.200.000	1 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	150.856.900	3	157.056.900	#DIV/0!	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS Provinsi, Kabupaten/Kota yang mengikuti Latsar	peserta	1383	peserta	26.000.000	171 peserta	18.739.999.000,00	1.771 peserta	10.018.647.700	3154	10.044.647.700	#DIV/0!	
	Jumlah PNS Provinsi, Kabupaten/Kota yang mengikuti PKA dan PKP		292		-			0		292		#DIV/0!	
Sub Kegiatan Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan untuk peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Orang	80	Orang	217.681.325	75 Orang		85 Orang		165	672.122.675	#DIV/0!	
	Jumlah diklat yang dipantau dan dievaluasi penyelenggaraannya	Kegiatan	49	Kegiatan	65.000.000	57 Kegiatan		171 Kegiatan		220	65.000.000	#DIV/0!	
	Jumlah laporan pengumpulan pengolahan data kediklatan	Laporan	4	Laporan	69.391.880	4 Laporan	346.168.410,00	12 Laporan	454.441.350	16	69.391.880	#DIV/0!	
	Jumlah alumni diklat manajerial yang di lakukan monev	Orang	75	Orang	42.967.800	75 Orang		225 Orang		300	42.967.800	#DIV/0!	
	Lama pelaksanaan pemenuhan informasi dan dokumentasi SKPD bagi publik	Bulan	1	Bulan	74.306.800	12 Bulan		36 Bulan		37	74.306.800	#DIV/0!	

Adapun rincian penyerapan anggaran tahun 2021 dari setiap kegiatan adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	%
1	2	4	5	6
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	27.726.519.707,00	24.177.699.835,00	87,20
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	27.726.519.707,00	24.177.699.835,00	87,20
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.722.653.997,00	11.110.972.708,00	87,33
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.902.820,00	146.821.350,00	96,02
5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.615.820,00	20.049.100,00	97,25
5.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.105.000,00	20.992.000,00	99,46
5.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.895.000,00	16.653.300,00	98,57
5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.000.000,00	44.696.400,00	99,33
5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.287.000,00	44.430.550,00	90,15
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.015.158.152,00	6.743.928.256,00	84,14
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.992.660.202,00	6.721.441.006,00	84,10
5.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.859.950,00	10.849.250,00	99,90
5.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	11.638.000,00	11.638.000,00	100,00
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	159.143.640,00	157.589.564,00	99,02
5.04.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000,00	14.411.264,00	96,08
5.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	144.143.640,00	143.178.300,00	99,33
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	395.026.640,00	264.174.150,00	66,88
5.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
5.04.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	80.442.640,00	78.120.950,00	97,11
5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	184.584.000,00	167.549.700,00	90,77
5.04.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	130.000.000,00	18.503.500,00	14,23
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	746.055.372,00	716.605.150,00	96,05
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000,00	59.336.300,00	98,89
5.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	277.500.000,00	270.927.900,00	97,63
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	34.918.500,00	99,77
5.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000,00	21.510.000,00	61,46
5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.859.372,00	288.539.050,00	99,89
5.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	49.696.000,00	41.373.400,00	83,25
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.678.541.570,00	2.515.403.738,00	93,91
5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.759.210,00	21.966.400,00	96,52
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	817.218.800,00	759.589.188,00	92,95
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.838.563.560,00	1.733.848.150,00	94,30
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	575.825.803,00	566.450.500,00	98,37
5.04.01.1.09.01	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	8.000.000,00	7.969.000,00	99,61
5.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	172.000.000,00	171.000.000,00	99,42
5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.500.000,00	35.651.500,00	95,07
5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	248.325.803,00	246.500.000,00	99,26
5.04.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000,00	55.445.000,00	92,41

5.04.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.885.000,00	99,77
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15.003.865.710,00	13.066.727.127,00	87,09
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	663.300.000,00	529.021.600,00	79,76
5.04.02.1.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri, Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	75.000.000,00	72.040.000,00	96,05
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	499.000.000,00	368.206.900,00	73,79
5.04.02.1.01.04	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	89.300.000,00	88.774.700,00	99,41
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	14.340.565.710,00	12.537.705.527,00	87,43
5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	76.496.000,00	76.002.700,00	99,36
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	120.000.000,00	118.419.750,00	98,68
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	150.000.000,00	147.604.700,00	98,40
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	13.598.469.300,00	11.819.371.327,00	86,92
5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	395.600.410,00	376.307.050,00	95,12
Jumlah		27.726.519.707,00	24.177.699.835,00	87,20

Dari anggaran Belanja APBD di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebesar Rp. 27.726.519.707,00 yang sudah terealisasi adalah sebesar Rp. 24.177.699.835,00 dan rata-rata capaian sasaran sebesar 87,20%. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya program/kegiatan di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 telah dilaksanakan secara maksimal namun masih terdapat deviasi anggaran sebesar 12,80%. Deviasi anggaran yang terjadi disebabkan terdapat *Silpa* hasil pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan kegiatan rutin kediklatan sebagai bentuk efisiensi anggaran di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun perincian capaian PAD di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	SOPD	Pendapatan Asli Daerah		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1	2	6	7	8
1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah	16.934.519.000,-	14.768.119.000,-	87,21

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Adapun capaian kinerja pelayanan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel T-C.2.

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	13
1	Persentase Peserta Diklat Prajabatan yang lulus dengan predikat memuaskan			75,00 %	80,00 %	85,00 %	95,00 %	96,00 %	96,00 %	0,00 %	99,95 %	
2	Persentase Peserta Diklat Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan			75,00 %	80,00 %	85,00 %	95,00 %	88,00 %	92,00 %	0,00 %	90,50 %	
3	Persentase Peserta Diklat Teknis yang lulus post test			60,00 %	65,00 %	70,00 %	85,00 %	99,00 %	100,00 %	73,50 %	94,46 %	
4	Persentase Peserta Diklat Fungsional yang lulus post test			60,00 %	65,00 %	70,00 %	80,00 %	99,00 %	100,00 %	124,36 %	151,51 %	
5	Pesentase terlaksananya sertifikasi profesi alumni diklat			75,00 %	80,00 %	85,00 %	95,00 %	55,00 %	60,00 %	0,00 %	97,50 %	
6	Pesentase layanan terhadap kepuasan penyelenggaraan diklat			70,00 %	75,00 %	80,00 %	90,00 %	72,00 %	81,00 %	73,52 %	89,60 %	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Penetapan program dan kegiatan tahun 2023 selalu memperhatikan kebutuhan pendidikan dan pelatihan di provinsi kalimantan tengah dengan tetap mengacu pada RPJMD, Renstra dan RKPD Provinsi Kalimantan serta memprioritaskan isu – isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah.

Dalam pengusulannya ada beberapa program dan kegiatan yang diharapkan dapat berkontribusi dalam isu – isu prioritas pusat dan daerah, yaitu :

1. Mampu mendiklatkan 20% ASN Provinsi Kalimantan Tengah selama 20 JP setiap tahunnya dalam mengembangkan kompetensinya seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Pembangunan ASN yang berdaya saing global menuju SMART ASN;
3. Penerapan pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) selama pandemic Covid-19.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan agar didapatkan program dan kegiatan yang tepat guna bagi perangkat daerah dan dipergunakan sesuai kebutuhan serta dana yang seminimal mungkin. Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD terdapat beberapa perubahan kegiatan baru yang dijabarkan dalam tabel ***Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah.***

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang dan pengusulan anggota dewan, tidak terdapat pengajuan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Sehingga secara keseluruhan pengajuan rencana kerja tahun 2023 berdasarkan pada isu-isu penting pemerintah pusat dan daerah serta berasal dari analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ASN provinsi Kalimantan Tengah.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nama Perangkat Daerah : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.274.434.680	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.274.434.680	
5.04.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Palangka Raya		154.936.070	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Palangka Raya		154.936.070	
5.04.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen RENJA SKPD	Palangka Raya	2 Dokumen	20.615.820	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen RENJA SKPD	Palangka Raya	2 Dokumen	20.615.820	
5.04.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD	Palangka Raya	2 Dokumen	21.105.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD	Palangka Raya	2 Dokumen	21.105.000	
5.04.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun	Palangka Raya	2 Dokumen	17.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun	Palangka Raya	2 Dokumen	17.500.000	
5.04.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun	Palangka Raya	2 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun	Palangka Raya	2 Dokumen	15.000.000	
5.04.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun	Palangka Raya	2 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun	Palangka Raya	2 Dokumen	10.000.000	
5.04.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendukung LPPD dan LKPJ yang tersusun Jumlah dokumen LKIP yang tersusun Jumlah laporan Monev Program dan Kegiatan yang tersusun Tersedianya Laporan TEPRA	Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan 4 Laporan	70.715.250	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendukung LPPD dan LKPJ yang tersusun Jumlah dokumen LKIP yang tersusun Jumlah laporan Monev Program dan Kegiatan yang tersusun Tersedianya Laporan TEPRA	Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan 4 Laporan	70.715.250	
5.04.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Palangka Raya		8.611.480.126	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Palangka Raya		8.611.480.126	
5.04.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Palangka Raya	55 Orang	8.307.329.126	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Palangka Raya	55 Orang	8.307.329.126	
5.04.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palangka Raya	1 Tahun	264.151.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palangka Raya	1 Tahun	264.151.000	
5.04.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya laporan inventarisasi barang dan asset SKPD	Palangka Raya	1 Laporan	12.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya laporan inventarisasi barang dan asset SKPD	Palangka Raya	1 Laporan	12.500.000	
5.04.01.1.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Palangka Raya	1 Laporan	12.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Palangka Raya	1 Laporan	12.500.000	
5.04.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD	Palangka Raya	2 Laporan	15.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD	Palangka Raya	2 Laporan	15.000.000	
5.04.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Palangka Raya		50.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Palangka Raya		50.000.000	
5.04.01.1.03.02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya asuransi perlindungan terhadap bangunan gedung kantor	Palangka Raya	8 Gedung	50.000.000	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya asuransi perlindungan terhadap bangunan gedung kantor	Palangka Raya	8 Gedung	50.000.000	
5.04.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Palangka Raya		221.656.920	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Palangka Raya		221.656.920	
5.04.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas beserta atributnya bagi ASN	Palangka Raya	92 Stel	147.200.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas beserta atributnya bagi ASN	Palangka Raya	92 Stel	147.200.000	

5.04.01.1.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya penilaian angka kredit bagi Widyaiswara	Palangka Raya	2 Kali	74.656.920	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya penilaian angka kredit bagi Widyaiswara	Palangka Raya	2 Kali	74.656.920	
5.04.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Palangka Raya		1.054.106.858	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Palangka Raya		1.054.106.858	
5.04.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Palangka Raya	1 Tahun	60.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Palangka Raya	1 Tahun	60.000.000	
5.04.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Palangka Raya Palangka Raya	1 Tahun 5 Paket	244.385.285	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Palangka Raya Palangka Raya	1 Tahun 5 Paket	244.385.285	
5.04.01.1.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Palangka Raya	5 Paket	163.590.083	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Palangka Raya	5 Paket	163.590.083	
5.04.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Palangka Raya	1 Tahun	30.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Palangka Raya	1 Tahun	30.000.000	
5.04.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/koran untuk kantor	Palangka Raya	2 Media cetak	23.725.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/koran untuk kantor	Palangka Raya	2 Media cetak	23.725.000	
5.04.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat konsultasi dan kordinasi luar daerah Terlaksananya rapat konsultasi dan kordinasi dalam daerah	Palangka Raya Palangka Raya	1 Tahun 1 Tahun	268.940.800	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat konsultasi dan kordinasi luar daerah Terlaksananya rapat konsultasi dan kordinasi dalam daerah	Palangka Raya Palangka Raya	1 Tahun 1 Tahun	268.940.800	
5.04.01.1.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertata dan terkelolanya pengarsipan dokumen dan buku perpustakaan	Palangka Raya	1 Tahun	84.825.400	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertata dan terkelolanya pengarsipan dokumen dan buku perpustakaan	Palangka Raya	1 Tahun	84.825.400	
5.04.01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terkelola dan tersedianya informasi berbasis elektronik (website) Terkelolanya PPID Pembantu SKPD	Palangka Raya Palangka Raya	1 Tahun 1 Tahun	178.640.290	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terkelola dan tersedianya informasi berbasis elektronik (website) Terkelolanya PPID Pembantu SKPD	Palangka Raya Palangka Raya	1 Tahun 1 Tahun	178.640.290	
5.04.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Palangka Raya		2.438.110.800	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Palangka Raya		2.438.110.800	
5.04.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkelolanya administrasi surat menyurat yang baik	Palangka Raya	1 Tahun	32.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkelolanya administrasi surat menyurat yang baik	Palangka Raya	1 Tahun	32.000.000	
5.04.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan jasa listrik, PDAM, telpon dan internet	Palangka Raya	12 Bulan	997.218.800	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan jasa listrik, PDAM, telpon dan internet	Palangka Raya	12 Bulan	997.218.800	
5.04.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya kebutuhan jasa kebersihan dan pelayanan umum kantor Tersedianya kebutuhan jasa tenaga administrasi, supir, tenaga kebersihan	Palangka Raya Palangka Raya	12 Bulan 37 Orang	1.408.892.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya kebutuhan jasa kebersihan dan pelayanan umum kantor Tersedianya kebutuhan jasa tenaga administrasi, supir, tenaga kebersihan	Palangka Raya Palangka Raya	12 Bulan 37 Orang	1.408.892.000	
5.04.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Palangka Raya		744.143.906	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Palangka Raya		744.143.906	
5.04.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang layak pakai Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/pajak STNK	Palangka Raya Palangka Raya	10 Unit 26 Unit	350.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang layak pakai Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/pajak STNK	Palangka Raya Palangka Raya	10 Unit 26 Unit	350.000.000	
5.04.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan Gedung dan mesin perkantoran	Palangka Raya	100 Unit	76.343.970	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan Gedung dan mesin perkantoran	Palangka Raya	100 Unit	76.343.970	
5.04.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Palangka Raya	1 Tahun	317.799.936	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Palangka Raya	1 Tahun	317.799.936	

5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Palangka Raya		19.587.811.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Palangka Raya		19.587.811.000	
5.04.02.1.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		Palangka Raya		1.115.000.000	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		Palangka Raya		1.115.000.000	
5.04.02.1.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersedianya Standar Perangkat Pembelajaran PDN Kompetensi Teknis umum dan fungsional dan Kompetensi teknis Inti	Palangka Raya	6 Dokumen	75.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersedianya Standar Perangkat Pembelajaran PDN Kompetensi Teknis umum dan fungsional dan Kompetensi teknis Inti	Palangka Raya	6 Dokumen	75.000.000	
5.04.02.1.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Inti bagi ASN Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional bagi ASN	Palangka Raya Palangka Raya	400 Peserta 400 Peserta	900.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Inti bagi ASN Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional bagi ASN	Palangka Raya Palangka Raya	400 Peserta 400 Peserta	900.000.000	
5.04.02.1.01.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Penguatiran, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya kordinasi dan fasilitasi kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Terlaksananya kordinasi dan fasilitasi kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	Palangka Raya Palangka Raya	1 Tahun 1 Tahun	140.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan, Penguatiran, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya kordinasi dan fasilitasi kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Terlaksananya kordinasi dan fasilitasi kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	Palangka Raya Palangka Raya	1 Tahun 1 Tahun	140.000.000	
5.04.02.1.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Palangka Raya		18.472.811.000	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Palangka Raya		18.472.811.000	
5.04.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Terkelolanya LSP-PDN Provinsi Kalimantan Tengah Terkelolanya Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN	Palangka Raya Palangka Raya	1 Tahun 1 Tahun	151.800.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Terkelolanya LSP-PDN Provinsi Kalimantan Tengah Terkelolanya Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN	Palangka Raya Palangka Raya	1 Tahun 1 Tahun	151.800.000	
5.04.02.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi bagi ASN	Palangka Raya	80 Orang	129.369.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi bagi ASN	Palangka Raya	80 Orang	129.369.000	
5.04.02.1.02.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Meningkatnya Kompetensi ASN dan Widyaiswara Terlaksananya Akreditasi Lembaga Pelatihan Terlaksananya monitoring sertifikasi dan standarisasi ISO 9001:2015	Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya	75 Orang 1 Tahun 1 Tahun	379.632.400	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Meningkatnya Kompetensi ASN dan Widyaiswara Terlaksananya Akreditasi Lembaga Pelatihan Terlaksananya monitoring sertifikasi dan standarisasi ISO 9001:2015	Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya	75 Orang 1 Tahun 1 Tahun	379.632.400	
5.04.02.1.02.07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS	Palangka Raya	2.264 Peserta	17.527.816.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS	Palangka Raya	2.264 Peserta	17.527.816.000	

		Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Terlaksananya workshop dan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/Kota Terlaksananya workshop pengembangan kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi	Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya	400 Peserta 120 Peserta 50 Peserta			Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Terlaksananya workshop dan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/Kota Terlaksananya workshop pengembangan kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi	Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya	400 Peserta 120 Peserta 50 Peserta				
5.04.02.1.02.08	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya penjaminan mutu pelatihan Terlaksananya evaluasi alumni pasca pelatihan Terlaksananya monitoring/pemantauan penyelenggaraan pelatihan Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan pelatihan Tersedianya data penyelenggaraan pelatihan	Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya	12 Bulan 75 Orang 12 Bulan 12 Bulan 4 Laporan	284.193.600	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya penjaminan mutu pelatihan Terlaksananya evaluasi alumni pasca pelatihan Terlaksananya monitoring/pemantauan penyelenggaraan pelatihan Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan pelatihan Tersedianya data penyelenggaraan pelatihan	Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya	12 Bulan 75 Orang 12 Bulan 12 Bulan 4 Laporan	284.193.600			
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN				32.862.445.680		JUMLAH TOTAL ANGGARAN				32.862.445.680		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Unsur utama penggerak kinerja birokrasi di Indonesia adalah pemerintah khususnya dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Kesadaran akan posisi Pegawai Negeri Sipil sebagai alat Vital Birokrasi ini mengandung konsekuensi logis yang menuntut Pegawai Negeri Sipil baik institusional maupun individual terus berbenah diri, melakukan berbagai upaya secara terprogram, konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah. Amanah tugas yang melekat pada diri aparatur harus dijalankan secara profesional dan dengan dedikasi yang tinggi disertai sikap pengabdian yang kokoh terhadap bangsa dan Negara serta kecintaannya pada eksistensi persatuan dan kesatuan.

Aparatur pemerintah menempati posisi yang amat strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara. Secara kelembagaan, hal ini tercerminkan pada berbagai fungsi yang terinternalisasi di dalamnya, yakni fungsi pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut kinerja aparatur akan menjadi tuntutan yang tidak terhindarkan, sehingga berbagai upaya yang terkait dengan peningkatan kinerja dimaksud harus menjadi agenda kebijakan utama, terlebih lagi bagi Pemerintah Daerah.

Kinerja aparatur pemerintah sangat terkait dengan aspek-aspek kelembagaan, sistem dan mekanisme kerja serta kompetensi yang harus dimiliki sesuai dengan jenjang jabatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dipenuhi secara sempurna jika terdapat kebijakan yang tepat mengenai peningkatan kinerja aparatur pemerintah.

Untuk menjawab tantangan tersebut di atas maka dibentuklah Badan Pemberdayaan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dimana dasar pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Sejalan dengan diselenggarakannya Otonomi Daerah yang dimulai tahun 2001, kebijakan yang dilakukan adalah melakukan standarisasi kompetensi dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur serta melaksanakan sistem komputerisasi administrasi kediklatan.

Program yang dilaksanakan meliputi Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pendidikan Kedinasan, Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan, Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan Pengembangan Aparatur yang merupakan acuan bagi sub bidang/bagian dalam menjalankan tupoksinya.

Sebagaimana diketahui, Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat menunjukkan capaian kinerja suatu program/kegiatan pada suatu unit kerja tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu pula. Telaahan terhadap kinerja setidaknya dapat menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Oleh karena itu, Telaahan terhadap kinerja dimaksudkan juga untuk memberikan penilaian atas capaian suatu program /kegiatan akhir pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan pembangunan.

Dari hal tersebut, maka sebagai dasar dalam penilaian pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dilakukan pengukuran kinerja dalam rangka memudahkan telaahan dan analisis lebih lanjut yang dapat dilihat dari nilai capaian kelompok indikator kinerja.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran juga menggambarkan tentang hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah untuk masa tahun 2021-2026 menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

TABEL 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan /sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN dan Kualitas Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Keterlaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN					
		Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi ASN	Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	80%	85%	85%	90%	90%
			Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang lulus post test	80%	85%	85%	90%	90%
			Persentase Peserta Pelatihan Jabatan fungsional sosial kultural yang lulus post test	75%	80%	80%	85%	85%
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kepuasan terhadap layanan penyelenggaraan diklat	80%	85%	85%	90%	90%

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam perancangan program dan kegiatan tahun 2023 dipengaruhi beberapa hal yang menjadi kebutuhan perangkat daerah guna pengembangan kompetensi ASN Kalimantan Tengah, antara lain :

- a. Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah 2021-2026;
- b. Isu strategis Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara;
- c. Kebutuhan kompetensi ASN Kalimantan Tengah;

Ketiga hal tersebut di atas merupakan dasar penetapan 2 program yang memfokuskan diri pada pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi ASN menuju SMART ASN yang berkelas dunia dimana besar kebutuhan dana/pagu indikatif untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 32.862.445.680,- (Tiga Puluh Dua Miliar Delapan

Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang bersumber dari 2 (dua) sumber dana yaitu APBD Murni dan APBD Kontribusi Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	
1.	APBD Murni	Rp.	17.602.229.680,-
2.	Kontribusi Kabupaten/Kota	Rp.	15.260.216.000,-
	Kebutuhan Dana	Rp.	32.862.445.680,-

Keseluruhan dana tersebut akan digunakan untuk dapat membiayai pelaksanaan diklat dan kebutuhan rutin lainnya yang dijabarkan dalam tabel T-C.5 berikut :

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Renja Tahun Anggaran 2023			Prakiraan Maju Tahun 2024	
				Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6		5	6
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.274.434.680			13.423.000.000
5.04.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Palangka Raya		154.936.070			158.000.000
5.04.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen RENJA SKPD	Palangka Raya	2 Dokumen	20.615.820	APBD	2 Dokumen	21.000.000
5.04.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD	Palangka Raya	2 Dokumen	21.105.000	APBD	2 Dokumen	22.000.000
5.04.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun	Palangka Raya	2 Dokumen	17.500.000	APBD	2 Dokumen	18.000.000
5.04.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun	Palangka Raya	2 Dokumen	15.000.000	APBD	2 Dokumen	15.000.000
5.04.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun	Palangka Raya	2 Dokumen	10.000.000	APBD	2 Dokumen	10.000.000
5.04.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendukung LPD dan LKPJ yang tersusun Jumlah dokumen LKIP yang tersusun Jumlah laporan Monev Program dan Kegiatan yang tersusun Tersedianya Laporan TEPPRA	Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan 4 Laporan	70.715.250	APBD	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan 4 Laporan	72.000.000
5.04.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Palangka Raya		8.611.480.126			8.670.000.000
5.04.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Palangka Raya	55 Orang	8.307.329.126	APBD	55 Orang	8.350.000.000
5.04.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palangka Raya	1 Tahun	264.151.000	APBD	1 Tahun	275.000.000
5.04.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya laporan inventarisasi barang dan asset SKPD	Palangka Raya	1 Laporan	12.500.000	APBD	1 Laporan	15.000.000
5.04.01.1.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Palangka Raya	1 Laporan	12.500.000	APBD	1 Laporan	15.000.000
5.04.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD	Palangka Raya	2 Laporan	15.000.000	APBD	2 Laporan	15.000.000
5.04.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Palangka Raya		50.000.000			55.000.000
5.04.01.1.03.02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya asuransi perlindungan terhadap bangunan gedung kantor	Palangka Raya	8 Gedung	50.000.000	APBD	8 Gedung	55.000.000
5.04.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Palangka Raya		221.656.920			225.000.000
5.04.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas beserta atributnya bagi ASN	Palangka Raya	92 Stel	147.200.000	APBD	93 Stel	150.000.000

5.04.01.1.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawain	Terlaksananya penilaian angka kredit bagi Widyaiswara	Palangka Raya	2 Kali	74.656.920	APBD	2 Kali	75.000.000
5.04.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Palangka Raya		1.054.106.858			1.075.000.000
5.04.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Palangka Raya	1 Tahun	60.000.000	APBD	3 Gedung	65.000.000
5.04.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Palangka Raya Palangka Raya	1 Tahun 5 Paket	244.385.285	APBD	1 Tahun 5 Paket	250.000.000
5.04.01.1.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Palangka Raya	5 Paket	163.590.083	APBD	5 Paket	165.000.000
5.04.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Palangka Raya	1 Tahun	30.000.000	APBD	1 Tahun	35.000.000
5.04.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/koran untuk kantor	Palangka Raya	2 Media cetak	23.725.000	APBD	2 Media cetak	25.000.000
5.04.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat konsultasi dan kordinasi luar daerah Terlaksananya rapat konsultasi dan kordinasi dalam daerah	Palangka Raya Palangka Raya	1 Tahun 1 Tahun	268.940.800	APBD	1 Tahun 1 Tahun	270.000.000
5.04.01.1.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertata dan terkelolanya pengarsipan dokumen dan buku perpustakaan	Palangka Raya	1 Tahun	84.825.400	APBD	1 Tahun	85.000.000
5.04.01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terkelola dan tersedianya informasi berbasis elektronik (website) Terkelolanya PPID Pembantu SKPD	Palangka Raya Palangka Raya	1 Tahun 1 Tahun	178.640.290	APBD	1 Tahun 1 Tahun	180.000.000
5.04.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Palangka Raya		2.438.110.800			2.485.000.000
5.04.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkelolanya administrasi surat menyurat yang baik	Palangka Raya	1 Tahun	32.000.000	APBD	1 Tahun	35.000.000
5.04.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan jasa listrik, PDAM, telpon dan internet	Palangka Raya	12 Bulan	997.218.800	APBD	12 Bulan	1.000.000.000
5.04.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya kebutuhan jasa kebersihan dan pelayanan umum kantor Tersedianya kebutuhan jasa tenaga administrasi, supir, tenaga kebersihan	Palangka Raya Palangka Raya	12 Bulan 37 Orang	1.408.892.000	APBD	12 Bulan 37 Orang	1.450.000.000
5.04.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Palangka Raya		744.143.906			755.000.000
5.04.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang layak pakai Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/pajak STNK	Palangka Raya Palangka Raya	10 Unit 26 Unit	350.000.000	APBD	10 Unit 26 unit	350.000.000
5.04.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan Gedung dan mesin perkantoran	Palangka Raya	100 Unit	76.343.970	APBD	100 Unit	80.000.000
5.04.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Palangka Raya	1 Tahun	317.799.936	APBD	1 Tahun	325.000.000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Palangka Raya		19.587.811.000			19.718.000.000
5.04.02.1.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		Palangka Raya		1.115.000.000			1.228.000.000
5.04.02.1.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersedianya Standar Perangkat Pembelajaran PDN Kompetensi Teknis umum dan fungsional dan Kompetensi teknis Inti	Palangka Raya	6 Dokumen	75.000.000	APBD	6 Dokumen	78.000.000

5.04.02.1.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Inti bagi ASN	Palangka Raya	400 Peserta	900.000.000	APBD	500 Peserta	1.000.000.000
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional bagi ASN	Palangka Raya	400 Peserta			500 Peserta	
5.04.02.1.01.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya kordinasi dan fasilitasi kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	Palangka Raya	1 Tahun	140.000.000	APBD	1 Tahun	150.000.000
		Terlaksananya kordinasi dan fasilitasi kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	Palangka Raya	1 Tahun			1 Tahun	
5.04.02.1.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Palangka Raya		18.472.811.000			18.490.000.000
5.04.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Terkelolanya LSP-PDN Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya	1 Tahun	151.800.000	APBD	1 Tahun	155.000.000
		Terkelolanya Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN	Palangka Raya	1 Tahun			1 Tahun	
5.04.02.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi bagi ASN	Palangka Raya	80 Orang	129.369.000	APBD	80 Orang	135.000.000
5.04.02.1.02.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Meningkatnya Kompetensi ASN dan Widyaiswara	Palangka Raya	75 Orang	379.632.400	APBD	75 Orang	150.000.000
		Terlaksananya Akreditasi Lembaga Pelatihan	Palangka Raya	1 Tahun			1 Tahun	
		Terlaksananya monitoring sertifikasi dan standarisasi ISO 9001:2015	Palangka Raya	1 Tahun			1 Tahun	
5.04.02.1.02.07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS	Palangka Raya	2.264 Peserta	17.527.816.000	APBD	2.264 Peserta	17.750.000.000
		Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Palangka Raya	400 Peserta			400 Peserta	
		Terlaksananya workshop dan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/Kota	Palangka Raya	120 Peserta			120 Peserta	
		Terlaksananya workshop pengembangan kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi	Palangka Raya	50 Peserta			50 Peserta	
5.04.02.1.02.08	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya penjaminan mutu pelatihan	Palangka Raya	12 Bulan	284.193.600	APBD	12 Bulan	300.000.000

		Terlaksananya evaluasi alumni pasca pelatihan	Palangka Raya	75 Orang			75 Orang	
		Terlaksananya monitoring/pemantauan penyelenggaraan pelatihan	Palangka Raya	12 Bulan			12 Bulan	
		Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan pelatihan	Palangka Raya	12 Bulan			12 Bulan	
		Tersedianya data penyelenggaraan pelatihan	Palangka Raya	4 Laporan			4 Laporan	
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN				32.862.445.680			33.141.000.000

BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penjabaran kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Rancangan Awal Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.274.434.680	
5.04.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.936.070	
5.04.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.615.820	APBD
5.04.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.105.000	APBD
5.04.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.500.000	APBD
5.04.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	APBD
5.04.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	APBD
5.04.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.715.250	APBD
5.04.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.611.480.126	
5.04.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.307.329.126	APBD
5.04.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	264.151.000	APBD
5.04.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.500.000	APBD
5.04.01.1.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.500.000	APBD
5.04.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	APBD
5.04.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	
5.04.01.1.03.02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	APBD
5.04.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	221.656.920	
5.04.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	147.200.000	APBD
5.04.01.1.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	74.656.920	APBD
5.04.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.054.106.858	
5.04.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	APBD

5.04.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	244.385.285	APBD
5.04.01.1.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	163.590.083	APBD
5.04.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	APBD
5.04.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.725.000	APBD
5.04.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.940.800	APBD
5.04.01.1.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	84.825.400	APBD
5.04.01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	178.640.290	APBD
5.04.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.438.110.800	
5.04.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.000.000	APBD
5.04.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	997.218.800	APBD
5.04.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.408.892.000	APBD
5.04.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744.143.906	
5.04.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000	APBD
5.04.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.343.970	APBD
5.04.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	317.799.936	APBD
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19.587.811.000	
5.04.02.1.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	1.115.000.000	
5.04.02.1.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	75.000.000	APBD
5.04.02.1.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	900.000.000	APBD
5.04.02.1.01.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	140.000.000	APBD
5.04.02.1.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	18.472.811.000	
5.04.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	151.800.000	APBD
5.04.02.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	129.369.000	APBD
5.04.02.1.02.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	379.632.400	APBD
5.04.02.1.02.07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17.527.816.000	APBD

5.04.02.1.02.08	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	284.193.600	APBD
JUMLAH TOTAL ANGGARAN		32.862.445.680	

BPSPDM Provinsi Kalimantan Tengah

BAB V

PENUTUP

Penetapan visi dan misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah yang tercantum dalam dokumen Rancangan Awal Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2023 dengan berdasarkan atas perubahan aturan tentang organisasi. Selain itu juga mempertimbangkan untuk mewujudkan pelayanan kediklatan yang profesional melalui aparatur yang memiliki kompetensi, bermoral, akuntabel dan sejahtera sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik sebagai agenda reformasi birokrasi.

Upaya pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah diarahkan pada pengembangan sistem manajemen kediklatan yang ada, membudayakan instrumen/infrastruktur manajemen kediklatan, mengembangkan sistem informasi kediklatan dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan dan Pelatihan, serta mengoptimalkan seluruh sumber daya secara bertahap.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang profesional bukan hal yang mudah karena menuntut adanya kejelasan komunikasi dan komitmen yang saling mendukung dari lini pelaksana sampai pada pejabat pembuat kebijakan.